

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), dan terletak di antara Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Adapun keadaan geografis dalam luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,15 Km persegi, terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dengan luas 4.736,70 Km persegi dan Pulau Sumbawa dengan luas 15.414,15 Km persegi, serta 280 pulau kecil dan 44 pulau yang telah berpenghuni.<sup>1</sup>

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki dua pulau besar yang terdiri dari 10 kabupaten/kota<sup>2</sup>, yaitu;

1. Pulau Lombok : Lombok Barat (Gerung), Lombok Tengah (Praya), Lombok Timur (Selong), Lombok Utara (Tanjung) dan Ibukota provinsi (Mataram).
2. Pulau Sumbawa : Sumbawa (Sumbawa Besar), Sumbawa Barat (Taliwang), Dompu (Dompu), Bima (Woha) / Kotamadya Bima (Raba).

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2017. *Geografi dan Iklim* Nusa Tenggara Barat. Hal. 1

<sup>2</sup> Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017. Hal.10

Hal yang menarik dari potensi pariwisata di NTB ini tidak hanya terbatas pada potensi wisata alamnya, akan tetapi dengan kependudukan yang beragam, sehingga mempunyai karakteristik budaya yang multietnik dari tiga suku besar yang ada, yang lebih dikenal dengan sebutan SASAMBO (Sasak, Samawa, Mbojo). Suku Sasak adalah suku asli di pulau Lombok. Suku Samawa dan Mbojo merupakan 2 suku besar yang ada di pulau Sumbawa. Di bagian pulau Lombok juga dihuni oleh etnik Bali serta adanya campuran etnis maupun budaya yang sudah ada sejak masa kerajaan dulu seperti etnik Jawa, Melayu, Banjar, Bugis dan Mandar, Timor, Cina dan Arab, yang memiliki adat istiadat budaya dan bahasa masing-masing yang saling berakulturasi satu dengan yang lainnya, sehingga menggambarkan NTB sebagai miniature Indonesia dan mozaik budaya nusantara. Provinsi NTB termasuk dalam salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) dengan letak wilayah yang sangat strategis dan disebut sebagai daerah segitiga emas Daerah Tujuan Wisata, yakni Bali disebelah barat, Sulawesi dan Toraja disebelah utara dan pulau Komodo disebelah timur.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah NTB 2009-2013:42

Gambar Peta Provinsi NTB sebagai berikut:



**Gambar 1. “West Nusatenggara Tourism Map”**

Letak Provinsi NTB yang berbatasan langsung dengan daerah wisata dunia yaitu Provinsi Bali sedikit banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata di NTB. Ada banyak kawasan wisata alam di Provinsi NTB yang tidak kalah menariknya dengan Bali, seperti Pantai Senggigi, Gili Trawangan (3 gili), Pantai Kuta/Pantai Aan, Pantai Lakey, Wisata Gunung Rinjani (Danau Segara Anak) dan masih banyak obyek wisata lainnya yang mampu menarik perhatian wisatawan asing dan didukung oleh sarana serta prasarana transportasi yang memadai untuk memberi kemudahan bagi pelancong dalam mengakses berbagai tujuan wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat.<sup>4</sup>

Adapun situs wisata yang ada di NTB dan menjadi kawasan bagi wisatawan diantaranya kawasan pariwisata Suranadi dan sekitarnya 96

---

<sup>4</sup> *Ibid*

hektar, kawasan pariwisata Sire, Gili Air, Senggigi dan sekitarnya 1.800 hektar, kawasan pariwisata Gili Gede dan sekitarnya 2.590 hektar, kawasan pariwisata Kuta, Seger, A'an dan sekitarnya 2.590 hektar, kawasan pariwisata Selong Belanak dan sekitarnya 480 hektar, kawasan pariwisata Gunung Rinjani dan sekitarnya 17.100 hektar, kawasan pariwisata Gili Indah dan sekitarnya 650 hektar, kawasan pariwisata Gili Sulat dan sekitarnya 1.317 hektar, kawasan pariwisata Dusun Sade dan sekitarnya 315 hektar, kawasan pariwisata Pulau Moyo dan sekitarnya 1.528 hektar, kawasan pariwisata Pantai Maluk dan sekitarnya 376 hektar, kawasan pariwisata Pantai Hu'u dan sekitarnya 2.756 hektar, kawasan pariwisata Sape dan sekitarnya 203 hektar, kawasan pariwisata Teluk Bima dan sekitarnya 201 hektar, kawasan pariwisata Gunung Tambora dan sekitarnya 2.526 hektar.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi destinasi wisata dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas wilayah terbesar, jumlah penduduk terbanyak dan kekayaan sumber daya alamnya yang membentang dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau besar dan kecil. Indonesia memiliki laut dan hamparan pantai yang indah tempat wisatawan melakukan aktivitas wisata bahari seperti *diving*,

---

<sup>5</sup> Draf Akhir RPJP NTB 2007-2027:6

*snorkeling* dan *surfing*. Ditunjang dengan iklim tropis, Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun karena berada pada lintasan garis khatulistiwa, sehingga aktivitas kepariwisataan tidak dipengaruhi oleh pergantian musim. Selain itu, Bangsa Indonesia terdiri atas lebih dari 500 suku (etnis), dengan bahasa dan budaya yang beraneka ragam. Keragaman suku dan budaya tersebut menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia karena memiliki atraksi wisata budaya dan kuliner yang sangat unik dan beragam.<sup>6</sup> Sehingga memiliki potensi yang menjadikan daya tarik tersendiri untuk lokasi destinasi wisata dunia.

Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.<sup>7</sup> Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, mencatat bahwa jumlah angka kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia menurut

---

<sup>6</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. “*Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok Tahun 2015-2019*”. Hal.11-12. (www.bappeda.ntbprov.go.id)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2011. “*Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*”. Dimuat dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/penjelasan.pdf> diakses 5 oktober 2017

kebangsaan tahun 2006 mencapai 11.519.275 wisatawan.<sup>8</sup> Pada tahun 2008 kepariwisataan Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 153,25 trilyun atau 3,09% dari total PDB Indonesia (BPS, 2010). Pada tahun 2009, kontribusinya meningkat menjadi 3,25%. Pertumbuhan PDB pariwisata pun sejak tahun 2001 selalu menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan PDB nasional. Walaupun masih menunjukkan angka sementara, pada tahun 2009 pertumbuhan PDB pariwisata mencapai 8,18%, sedangkan PDB nasional hanya 4,37%. Pada tahun yang sama, devisa dari pariwisata merupakan kontributor terbesar ketiga devisa negara, setelah minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Peringkat ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sejak tahun 2006 yang hanya menempati peringkat ke-6 dari 11 komoditi sumber devisa negara. Dari neraca tersebut menjadikan kepariwisataan Indonesia sebagai penggerak perekonomian nasional yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Indonesia mempunyai potensi daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadikan ikon destinasi wisata yang banyak

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, "*Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan, 2000-2006*". Dimuat pada <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1394> diakses pada tanggal 05 oktober 2017

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Hasil Penelitian dan Pengembangan, "*Dampak Event Pariwisata*" 2011. Dimuat dalam <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=100&id=1037> diakses tanggal. 5 oktober 2017

diminati oleh para pelancong wisatawan nasional hingga mancanegara, selain yang lebih dikenal dunia seperti Bali, termasuk juga Provinsi NTB yang kini kerap menjadi lokasi populer di kalangan wisatawan lokal hingga mancanegara mulai ramai berdatangan. Selain letak geografis wilayah yang berdekatan dengan Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia yang mampu memberikan keuntungan tersendiri dalam distribusi wisatawan khususnya pada wisatawan mancanegara, NTB juga memiliki potensi kekayaan yang sangat besar dalam menjadikan lokasi promosi destinasi wisata tingkat dunia. Pesona keindahan alam serta keunikan budaya NTB menyimpan potensi pariwisata yang diminati oleh banyak wisatawan. Salah satu majalah wisata terkemuka di Indonesia ‘Majalah Venue’ mencatat bahwa pulau Lombok termasuk dalam lima besar destinasi wisatawan terfavorit setelah Bali, Jakarta, NTT (Komodo) dan Yogyakarta.<sup>10</sup>

Di era modern saat ini Pariwisata telah menjadi salah satu industri besar yang digunakan untuk memperkenalkan sumber daya alam suatu Negara ke Kancan Internasional. Dalam waktu kurun dua puluh tahun terakhir UNWTO (*Global Code of Ethics for Tourism*) mencatat rekor jumlah wisatawan internasional pada tahun 2012 mencapai 1 milyar orang dengan pendapatan ekspor internasional sebesar 1,3 triliun US\$.

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2017. *Hotel dan Pariwisata* Nusa Tenggara Barat. Hal. 35

Pada tahun 2013 jumlah wisatawan internasional meningkat menjadi 1,08 milyar, dan lebih dari 6 milyar wisatawan memenuhi wisata dalam negeri masing-masing. Sedangkan dalam perkiraan jumlah wisatawan internasional akan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,4 milyar dan pada tahun 2030 diperkirakan lebih meningkat menjadi 1,8 milyar jumlah wisatawan internasional.<sup>11</sup>

Semakin populernya kegiatan pariwisata juga memicu pertumbuhan pada sektor industri dan ekonomi, seperti adanya pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang memadai, mulai dari hotel, resort, restoran dan banyak spot lainnya, sehingga atas peluang yang terjadi dalam peningkatan pariwisata yang ada di NTB memunculkan adanya sebuah persaingan yang mengakibatkan masuknya investasi asing yang semakin meningkat.

Pariwisata NTB sendiri masih terbilang belum dikenal dalam Pasar Pariwisata Internasional. Tetapi perkembangan pariwisata di NTB sendiri terus berjalan dengan pesat. Sumber daya alam yang melimpah, taman nasional, beraneka ragam pemandangan mulai dari area perairan sampai hutan hujan dan budayanya yang unik memberikan warna khusus bagi

---

<sup>11</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal.11  
[www.bappeda.ntbprov.go.id](http://www.bappeda.ntbprov.go.id)



Lombok dan menjadi daya saing yang sangat berharga.<sup>12</sup> Pembangunan pariwisata di NTB banyak memberikan hasil yang terus meningkat pada tiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang terus berdatangan. Berdasarkan Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2017 memaparkan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 meningkat 39,97 persen dibanding tahun 2015 sebanyak 3.094.437 orang, selama periode 2011-2016 jumlah kunjungan wisatawan ke NTB terus meningkat. Dan pertumbuhan infrastruktur atas industri dari perkembangan pariwisata tahun 2016 jumlah hotel sebanyak 947, dengan 65 diantaranya adalah hotel berbintang. Jumlah restoran sebanyak 1.379, dengan jumlah restoran terbanyak berada di kabupaten Lombok utara. Rasio penyerapan TK/hotel untuk hotel berbintang adalah 53, sedangkan hotel non bintang hanya ada 6 hotel.<sup>13</sup>

Upaya pemerintah Indonesia dalam mempromosikan sektor pariwisata ke tingkat internasional pernah dilakukan pada zaman pemerintahan orde baru dalam sebuah program ‘*Visit Indonesia Year*’ pada tahun 1991. Program tersebut bertujuan sebagai payung dalam mempercepat pembangunan dan persiapan dalam meningkatkan sektor pariwisata khususnya dalam menarik wisatawan mancanegara karena

---

<sup>12</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. “*Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok Tahun 2015-2019*”. Ringkasan Eksekutif. Hal. 8. [www.bappeda.ntbprov.go.id](http://www.bappeda.ntbprov.go.id). Pdf diakses tanggal, 2 oktober 2017

<sup>13</sup> Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017. *Hotel dan Pariwisata*. Hal.331

mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar untuk sebuah kepentingan nasional, baik di berbagai tujuan pariwisata unggulan nasional maupun tujuan pariwisata potensial lainnya. Namun dengan adanya berbagai gejolak politik dalam negeri serta dinamika demokrasi di Indonesia membuat beberapa program menjadi terhambat sehingga program *Visit Indonesia Year* sempat menjadi vakum dan berhenti cukup lama. Pada tahun 2008 program '*Visit Indonesia Year*' kembali dilaksanakan sehingga membuat rentan waktu dalam proses percepatan dan persiapan dalam meningkatkan wisatawan mancanegara belum begitu maksimal sesuai dengan tujuan dari program promosi yang dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia telah memperluas dan mengembangkan aksesibilitas udara, darat, dan laut dari pusat-pusat distribusi pariwisata di tanah air. Hal ini dilakukan agar seluruh daerah tujuan wisata yang potensial dapat terhubung dengan baik, sehingga mempercepat pengembangannya sebagai obyek pariwisata yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Sebagai bentuk strategi pemerintah pusat dalam mempromosikan pariwisata melalui program dengan menggunakan slogan '*Visit*' membuat beberapa daerah di Indonesia mengikuti sebagai bentuk dari promosi pariwisata daerah, dalam bekerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mempromosikan destinasi wisata dalam

meningkatkan kunjungan wisatawan asing sebagai kepentingan pertumbuhan daerah, seperti yang dilakukan oleh beberapa daerah yakni, *Visit Batam 2010*, *Visit Bangka Belitung Archipelago 2010*, serta *Visit Lombok Sumbawa 2012*.

Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam sebuah kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1979, beralih menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain melalui pembinaan izin usaha pariwisata yang mudah dan cepat. Dalam era otonomi daerah tersebut, segala urusan kepariwisataan terutama yang menyangkut usaha dan jasa pelayanan pariwisata menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, maka kekuatan-kekuatan suatu daerah disamping mengandalkan kemampuan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah seperti sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan industri, dimasa depan tetap memegang peranan strategis dan pariwisata diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru dalam perekonomian daerah.

Dari adanya peraturan pemerintah tersebut mampu mendorong dengan gencarnya promosi pariwisata dan budaya oleh daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia. Termasuk salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang notabene merupakan tetangga dari Bali yang

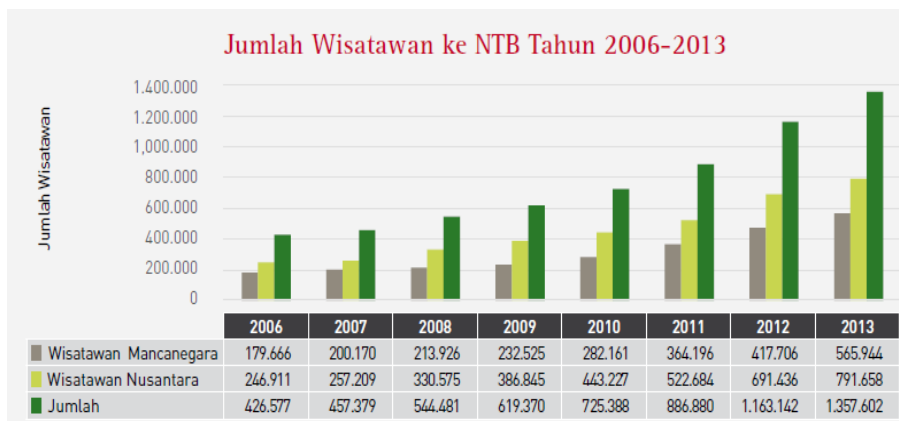
pariwisatanya sudah lebih dulu mendunia. Sejak tahun 1979 ditetapkan NTB sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia terhadap pembangunan kepariwisataan. Secara destinasi (*destination*) telah berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa mengenai kinerja kepariwisataan NTB. Hal tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode, antara lain; (1) periode pada tahap pembangunan yakni masa sampai akhir 90an; (2) periode recovery yakni awal tahun 2000 sampai dengan 2005; (3) periode kebangkitan yang masih berlangsung hingga sekarang.

Pada tahun 2000 era millennium Perkembangan industri pariwisata NTB layaknya perkembangan pariwisata pada umumnya yang selalu dipengaruhi oleh berbagai peristiwa politik, ekonomi, dan sosial pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ada beberapa peristiwa yang secara berturut-turut dari adanya peristiwa dalam negeri sangat mempengaruhi perkembangan industri pariwisata daerah khususnya daerah NTB selama periode 1997-2006 yang meliputi:

1. Instabilitas politik dalam negeri yang diawali dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1997;
2. Kerusuhan sosial mengenai Suku, Ras, Agama dan Antar golongan (SARA) yang terjadi di Mataram tahun 2000;
3. Serangan teroris di Bali tahun 2002 dan 2005;

4. Bencana alam seperti Tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004, Gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006; dan
5. Penyebaran Virus SARS dan flu burung di Asia Tenggara tahun 2005.

Pada tahun 2006 aktivitas kepariwisataan NTB terlihat mulai meningkat dari catatan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin tinggi dari periode sebelumnya. Terlihat pada gambar statistik kunjungan wisatawan NTB, yakni:



**Gambar 2. Jumlah kunjungan wisatawan NTB**

*Sumber: Dikutip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB 2013*

Adanya peningkatan jumlah wisatawan terlihat sangat signifikan dari tahun ke tahun. Sejak periode sebelum tahun 2000, wisatawan yang berkunjung banyak didominasi oleh wisatawan mancanegara, akan tetapi pada periode setelah tahun 2006 mulai didominasi oleh wisatawan domestik. Fenomena ini bisa jadi dipicu oleh meningkatnya perekonomian dalam negeri yang disertai oleh lebih tingginya dorongan wisatawan domestik untuk melakukan perjalanan di dalam negeri. Contoh

salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan wisatawan di NTB adalah karena mulai beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2011. Data tersebut memberikan indikasi menguatnya permintaan pariwisata dalam negeri yang menguntungkan aktivitas kepariwisataan yang ada di NTB.

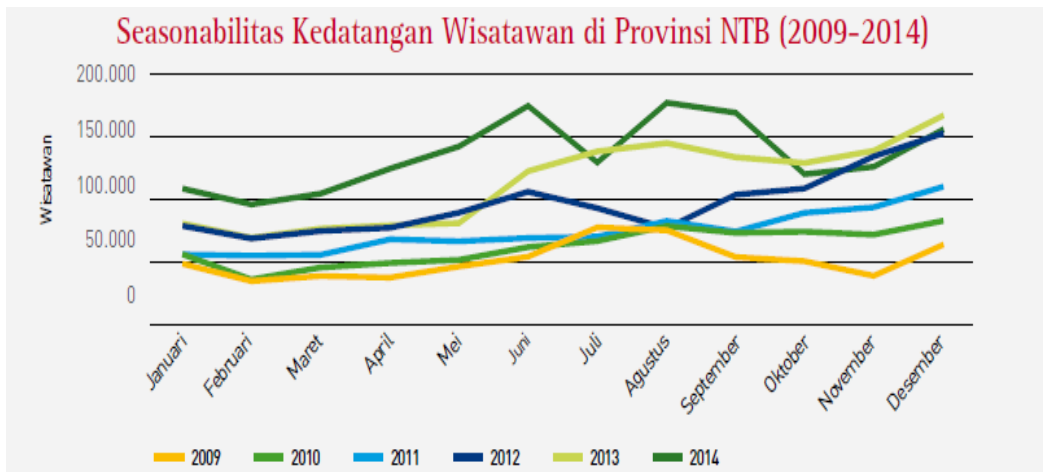
Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan di NTB mencapai 1.629.122 juta, meningkat 20% dibandingkan dengan tahun 2013. Selama tahun terakhir pertumbuhan tahunan wisatawan sangat mengesankan dan tampaknya sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai target 2 juta wisatawan di tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh pemerintah NTB. Potensi yang didominasi oleh pasar domestik, yang menyumbang hampir 60% dari kunjungan. Mayoritas wisatawan domestik berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya serta dari Makassar dan Bali. Sisanya adalah wisatawan dari kawasan ASEAN dan pasar luar negeri lainnya. Berbeda dengan kunjungan wisatawan di Indonesia pasar outbound didominasi oleh Eropa dengan Perancis, Jerman dan Belanda yang mendominasi di tahun 2013/14. Wisatawan Asia masih rendah jumlahnya, namun koneksi penerbangan baru dari Singapura, Bali (dan untuk sementara dari Perth) telah mengubah keadaan ini. Kedatangan pengunjung dari Australia melonjak tinggi pada kuartal pertama tahun

2013/2014. Pada 2015 peningkatan pasar terutama diharapkan berasal dari pasar Asia.

Menurut data seasonabilitas terhadap kedatangan wisatawan di Provinsi NTB tahun 2009-2014 terlihat adanya sebuah kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan setiap tahun, dan yang menarik adalah kecenderungan terjadinya *peak season* setiap akhir tahun. Bulan-bulan yang termasuk ramai bagi kepariwisataan di Lombok dimulai pada bulan Mei, dimana terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata yang mencapai puncaknya (*peak*) pada bulan Agustus. Hal ini dipicu oleh libur musim panas di Eropa dan Amerika, libur tengah semester di Indonesia, dan musim libur lebaran di Indonesia yang jatuh pada pertengahan tahun sejak 2009<sup>14</sup>. Terlihat pada data seasonabilitas pada gambar, yakni:

---

<sup>14</sup> *Ibid. hal,32*



**Gambar 3. Seasonabilitas ke NTB dalam 6 tahun terakhir**  
*Sumber: Dikutip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB 2014*

Mayoritas wisatawan yang datang ke Lombok adalah wisatawan individu /*Free Independent Traveller* (FIT) yang berumur antara 25-40 tahun, hampir 50% belum menikah dan 60% berjenis kelamin laki-laki. Wisatawan yang berkunjung ke Lombok memesan jasa perjalanan mereka secara terpisah karena paket tur yang ada tidak begitu digemari.

Penurunan jumlah wisatawan rata-rata terjadi pada bulan September, Oktober, dan November, dan kembali meningkan pada bulan Desember bersamaan dengan musim liburan Natal dan Tahun Baru yang berakhir sampai pertengahan Januari tahun berikutnya. Jumlah wisatawan terendah terlihat pada bulan Februari, Maret dan April bersamaan dengan musim hujan di NTB. Selain itu, salah satu daya tarik wisata unggulan Lombok yaitu Gunung Rinjani ditutup untuk 3 bulan dimulai dari bulan Februari hingga April. Ditutupnya Gunung Rinjani oleh Balai Taman



Nasional Gunung Rinjani dilakukan karena beberapa alasan, yang pertama yaitu untuk alasan keselamatan wisatawan karena dianggap tidak aman untuk melakukan pendakian pada saat musim penghujan karena jalur pendakian akan sangat licin. Yang kedua yaitu untuk menjaga keberlanjutan kehidupan keanekaragaman hayati yang terdapat di Gunung Rinjani.

Daya tarik wisata alam, beragam kegiatan luar ruang, serta wisata olahraga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam pertumbuhan pariwisata NTB saat ini dapat diperkirakan pertumbuhan di masa mendatang menunjukkan angka yang positif dan diperkirakan akan terus meningkat, karena adanya sebuah potensi dan menjadikan peluang bagi pemerintah NTB untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang yang ada. Adanya sebuah peluang jelas berkaitan dengan timbulnya sebuah tantangan yang selalu menjadikan halangan serta persoalan yang menjadi kinerja pemerintah daerah untuk membentuk sebuah upaya dimana tujuan dari pengembangan dari adanya peluang dapat tercapai. Bagaimanapun, tantangan terbesar yang ada yaitu untuk menyeimbangkan bisnis pariwisata yang terus berkembang dengan pelestarian warisan budaya, perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Aktivitas kepariwisataan bersifat lintas sektoral dan membawa beragam dampak mulai dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, terutama pada destinasi di mana aktivitas kepariwisataan berlangsung. Pemerintah daerah NTB mengakui potensi ekonomi dan kontribusi sosial dari sektor pariwisata, sehingga pemerintah mengarahkan agar keuntungan ekonomi dan sosial dari sektor pariwisata tetap dipertahankan sambil tetap berusaha mengurangi dampak yang tidak diinginkan terhadap alam, sejarah, budaya atau lingkungan sosial dengan cara menyeimbangkan kebutuhan wisatawan untuk disesuaikan dengan lingkungan sekitar, masyarakat setempat dan bisnis pariwisata pada destinasi tersebut.

Pulau Lombok dan Bali telah ditetapkan menjadi pintu gerbang pariwisata Nasional dalam MP3EI Koridor V (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pembangunan kepariwisataan NTB telah berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa namun hingga kini belum memiliki arah yang jelas karena tidak didukung oleh perencanaan yang matang. Sebagai aktivitas yang bersifat lintas sektoral, sektor pariwisata membawa dampak langsung dan tidak langsung terhadap tiga aspek utama pembangunan (*triple bottom line*) yang meliputi: ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah upaya

memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif aktivitas kepariwisataan terhadap ketiga aspek pembangunan tersebut.

Melihat potensi pariwisata yang ada di NTB memiliki nilai daya tarik untuk mendatangkan wisatawan lokal hingga mancanegara serta peluang bagi investasi asing. Dari beberapa potensi yang telah dipaparkan memunculkan beberapa upaya pemerintah provinsi NTB dalam memanfaatkan pariwisata sebagai sarana diplomasi untuk mempromosikan destinasi pariwisata ke kancah internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka muncul pertanyaan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

**“Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Meningkatnya Angka Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke NTB Di Tahun 2011 s/d 2016?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempromosikan pariwisata ke kancah Internasional. Dari tujuan tersebut dapat memusatkan perhatian penelitian terhadap dampak atas kunjungan wisatawan mancanegara terhadap perubahan

sektor ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, dan keuntungan yang diperoleh provinsi NTB.

- b. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan oleh penulis.
- c. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah dan mengaplikasikannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendiskripsikan serta menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
- d. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu:

- a. Secara praktis, diharapkan bagi pemerintah daerah provinsi NTB sebagai tambahan baru atas masukan dan pertimbangan yang menjadi fokus penelitian ini guna membantu kinerja dari upaya pemerintah daerah serta peran masyarakat lokal untuk dapat melihat peluang dan tantangan terhadap perubahan daerah dari dampak atas upaya mempromosikan pariwisata provinsi NTB pada persaingan global.

- b. Bagi pihak akademisi, diharapkan thesis ini dipercaya dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian peran aktor hubungan internasional yang mana penelitian ini memfokuskan pada peran pemerintah daerah dalam mempromosikan destinasi wisata ke tingkat internasional dengan bentuk diplomasi publik sebagai alat dari instrument *soft diplomacy* yang digunakan, sebagai salah satu bentuk dari diplomasi yang memiliki bentuk strategi aktor terhadap peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama internasional.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan sebuah topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, maupun sumber-sumber tertulis baik secara cetak maupun elektronik lain.

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi

kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Untuk melakukan tinjauan pustaka, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan (Roth 1986).

Adapun tinjauan pustaka di dalam penelitian tesis ini yang berjudul: *“STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA KE KANCAH INTERNASIONAL”*. Ada beberapa peneliti sebelumnya yang meneliti tentang strategi atau bentuk upaya, efektifitas pemerintah NTB dalam beberapa persoalan atau masalah, dan pembahasan yang berkaitan dengan destinasi pariwisata NTB di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Penulis akan mengemukakan beberapa tinjauan pustaka yang disederhanakan dengan menggunakan tabel, antara lain:

**Tabel 1. Tinjauan Pustaka**

NO	NAMA	JUDUL	RANGKUMAN
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Baddar Mahasiswa S-2 Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia tahun 2011	<i>“Analisa Strategi Program Visit Lombok Sumbawa 2012 (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB)”</i> .	<p>Tesis ini membahas tentang strategi program dan kebijakan yang telah dilakukan dalam sektor pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi NTB selama kurun waktu 2008 s/d 2010 dengan menargetkan program berupa pencapaian satu juta wisatawan pada tahun 2012. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Masih lemahnya koordinasi antar sektor pemerintahan dan swasta membuat sinergi program kegiatan belum optimal. (2) Indikator kegiatan yang masih kurang. (3) Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata baik untuk pelaku usaha maupun birokrat pelaksana kegiatan level Provinsi dan Kabupaten/Kota. (4) Penelitian dan pengembangan sektor pariwisata melibatkan <i>stakeholder</i> terkait maupun pihak akademisi untuk pengembangan sektor pariwisata selanjutnya.</p> <p>Dari hasil analisa penelitian tersebut memunculkan adanya saran tentang penyempurnaan program evaluasi dari sisi hukum maupun aspek legal formal dengan adanya pembuatan RIPPARDA maupun PERDA/Pergub yang mengatur atau sebagai acuan</p>

			<p>dalam pelaksanaan program kegiatan pariwisata, kerjasama dan koordinasi baik lintas sektor maupun antar sektor swasta dan pemerintahan serta adanya Peningkatan kualitas dan kompetensi birokrat dan pelaku industri pariwisata. Penelitian tersebut dapat menguatkan argumen penting terhadap evaluasi lebih lanjut dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan terhadap perkembangan pariwisata atas peningkatan wisatawan yang semakin meningkat selama kurun waktu 2011 s/d 2016 sesuai dari hitungan statistik peningkatan wisatawan NTB hingga tahun 2017 menjadikan bentuk upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dilakukan pemerintah NTB selaku aktor diplomasi dalam memanfaatkan pariwisata sebagai sarana destinasi pariwisata ke tingkat global.</p>
2.	<p>Penelitian dengan kasus yang sama dilakukan oleh Lutfirida Salman Mahasiswa S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas</p>	<p><i>“Analisis Perencanaan Program Komunikasi Pemasaran Visit Lombok Sumbawa 2012”</i></p>	<p>Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang dipaparkan lebih memfokuskan pada tahapan dalam perencanaan program komunikasi pemasaran pada kasus Program <i>Visit Lombok Sumbawa</i> dan mengetahui adanya keterlibatan pihak sebagai aktor yang berperan dalam perencanaan tersebut</p>



	Maret Surakarta tahun 2010		<p>pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut mengemukakan sebuah upaya dalam mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif sehingga diperlukan sebuah perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Isi dari rencana program komunikasi pemasaran Visit Lombok Sumbawa 2012 dianalisis berdasarkan model SOSTAC + 3Ms planning system yang dikemukakan oleh P.R. Smith. Elemen-elemen dalam perencanaan komunikasi pemasaran ini yaitu: <i>Situation, Objective, Strategy, Tactics, Action, Control, ditambah dengan Men, Money, dan Minutes.</i></p> <p>Hasil analisa penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan program komunikasi pemasaran Visit Lombok Sumbawa 2012 merupakan bagian dari program pemerintah pusat yaitu <i>Visit Indonesia Year.</i> Selain itu Program-program Disbudpar NTB sudah baku dari Depbudpar RI, dan Disbudpar NTB bertanggung jawab menurut kebijakan serta mekanisme anggaran. Hal tersebut menjadikan tinjauan penting bagi Disbudpar NTB dapat mengajukan kegiatan-kegiatan yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan potensi pariwisata NTB. Oleh</p>
--	----------------------------------	--	--

			<p>karena itu dapat menjadikan tinjauan penting dalam penelitian ini dengan adanya sebuah kerjasama dalam hal komunikasih antara pemerintah selaku aktor diplomasi dalam penelitian ini sebagai sarana diplomasi dalam memanfaatkan potensi wisata serta meningkatkan wisatawan mancanegara untuk mempromosikan pariwisata NTB ke kancah internasional.</p>
3.	<p>Penelitian serupa yang dilakukan oleh Wahyuni Berlian Augusta Simorangkir mahasiswa S-2 Pada Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Denpasar 2015</p>	<p><i>“Evaluasi Promosi Program Visit Lombok Sumbawa Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB”.</i></p>	<p>Pentingnya penelitian ini adanya upaya untuk mengetahui bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB dalam mempromosikan program <i>Visit Lombok Sumbawa</i> serta mengevaluasi dari setiap promosi yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB yang dilihat dari pengamatan langsung dilapangan dan hasil wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB telah dilaksanakan namun belum dilaksanakan secara optimal. Dikarenakan pelaksanaan kegiatan promosi tersebut menemui kendala dilapangan yang menjadi perhatian bagi semua pihak dan harus segera</p>

			<p>dibenahi. Adapun hasil dari evaluasi promosi yang dilakukan oleh Dinas budaya pariwisata Provinsi NTB adalah suatu hasil dari sebuah promosi yang hanya memberikan informasi kepada calon wisatawan mengenai <i>Visit Lombok Sumbawa</i> namun belum optimal dalam menarik calon wisatawan domestic maupun internasional untuk berkunjung ke NTB.</p> <p>Dari hasil penelitian tersebut mampu menjadikan acuan sebagai tolak ukur evaluasi lebih lanjut dari penelitian ini, sebagai bentuk strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam program pengembangan pariwisata guna mempromosikan pariwisata ke kancah internasional dengan meningkatkan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini pada tahun 2011 s/d 2016.</p>
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Suci Lukitowati mahasiswa S-2 pada program pascasarjana ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan</p>	<p>Tesis yang berjudul "<i>Manajemen Promosi Online Pariwisata Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB</i></p>	<p>Dalam penelitian ini penulis melihat adanya peran pemerintah daerah terhadap lembaga terkait yakni Badan Promosi Pemerintah Daerah (BPPD) NTB yang bertanggung jawab pada kegiatan promosi pariwisata belum maksimal mempromosikan pariwisata secara <i>online</i>. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya</p>

	politik UGM tahun 2014	<p><i>dalam Mengelola Promosi Online Tahun 2013-2014)</i>".</p>	<p>manusia serta minimnya pengawasan dalam mengontrol kinerja pihak ketiga dalam mengelola <i>website</i>. Kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya kesiapan organisasi BPPD NTB dalam hal sumber daya manusia. Namun, pada bulan Agustus 2014 promosi online mulai digarap kembali. Hal yang dilakukan yaitu revitalisasi <i>website</i> resmi BPPD NTB yang beralamat di <i>www.bppdntb.com</i>, serta membuat <i>fanpage facebook</i> bernama BPPD NTB dan menghadirkan aplikasi untuk telepon pintar berbasis android bernama <i>Holiday is Lombok Sumbawa</i>.</p> <p>Dari penelitian tersebut dapat dijadikan landasan literature dalam penelitian ini sebagai tolak ukur penelitian lebih lanjut pada bentuk strategi pemerintah daerah NTB dalam mempromosikan pariwisata secara <i>online</i>. Adapun kasus yang akan diteliti lebih lanjut pada fokus masalah peningkatan wisatawan mancanegara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB sebagai bentuk promosi pariwisata ke kancah internasional. Oleh karena itu jangkauan penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut pada tahun 2011-2016 sesuai dengan jangkauan peneliti sebelumnya tahun 2013-2014 mengenai peran pemerintah selaku aktor</p>
--	------------------------	---	--

			diplomasi dalam mempromosikan pariwisata.
5.	Penelitian mengenai pembangunan pariwisata dengan bentuk kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Muhaidin Mahasiswa S-2 Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan UMY	Pada jurnal yang berjudul: <i>“Kerjasama Antar Daerah Dalam Pembangunan Pariwisata Teluk Saleh, Pulau Moyo Dan Gunung Tambora (Samota) Tahun 2015”</i> ,	Penelitian dari kerjasama antar daerah pada penerapan yang ditujukan dalam sebuah otonomi daerah yang melibatkan destinasi pariwisata sebagai studi kasus dari penelitian. Berbeda dengan penelitian yang penulis akan teliti lebih lanjut pada fokus masalah atas perkembangan potensi pariwisata NTB yang semakin meningkat sehingga menjadikan pemerintah daerah sebagai aktor diplomasi dalam mengembangkan peningkatan potensi pariwisata guna mempromosikan pariwisata ke kancah Internasional. Namun dengan adanya sebuah kerjasama antar daerah dapat menjadikan bagian dari bentuk terlaksana strategi pemerintah NTB dalam kasus yang akan diteliti.
6.	Penelitian yang dilakukan oleh Fajri Assidiq Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS sebagai penulis pertama dan	Penelitian yang berjudul: <i>“Upaya Diplomasi Publik Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta Dalam Rangka Menjadikan Kota</i>	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang bagaimana hasil kinerja pemerintah dalam mempromosikan kekayaan pariwisata melalui diplomasi publik dengan batasan tinjauan penelitian tahun 2010 s/d 2015. Dengan menggunakan konsep diplomasi publik dan <i>soft power diplomacy</i> memberikan paparan tentang upaya pemerintah kota Surakarta dalam penjualan potensi wisata

	<p>Salieg Luki Munestri yaitu Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS sebagai penulis kedua</p>	<p><i>Surakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional Tahun 2010-2015”.</i></p>	<p>Surakarta di mata publik. Kemudian dalam menganalisa upaya ini penulis menggunakan teori Neoliberalisme. Pada akhir jurnal ini, penulis berkesimpulan bahwa upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk membawa Kota Surakarta sebuah reputasi dan sebuah kota yang harus dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara berhasil dilakukan meski ada yang banyak masalah yang dihadapi.</p> <p>Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, dari kasus yang sama dengan objek penelitian yang berbeda, sama-sama melihat dan menganalisa adanya sebuah upaya atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan destinasi pariwisata ke tingkat Internasional dengan menggunakan teori atau konsep diplomasi publik (<i>soft power diplomacy</i>). Akan tetapi dari segi objek penelitian yang difokuskan berbeda dengan penelitian yang akan difokuskan, yakni pemerintah NTB. Dari penelitian yang akan diteliti lebih lanjut akan memfokuskan pada masalah dinamika peningkatan wisatawan dari perkembangan pariwisata NTB tahun 2011 s/d 2016 yang terus meningkat. Dengan adanya peningkatan</p>
--	--	--	---

			tersebut maka penulis akan menganalisa adanya sebuah proses perkembangan pariwisata yang ada di NTB sebagai kinerja bagi strategi pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi pariwisata yang ada guna meningkatkan wisatawan mancanegara untuk menjadikan pariwisata NTB sebagai destinasi pariwisata dunia. Penelitian sebelumnya dapat menjadikan acuan gambaran untuk memperkuat perencanaan penelitian yang akan diteliti lebih lanjut.
--	--	--	---

Dalam buku yang di tulis oleh Takdir Ali Mukti dengan judul buku “ *Paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh Pemda di Indonesia*” buku ini membahas tentang : Hubungan Transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca *Regim Westphalia* memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara, lokal, institusional maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan “suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan share” kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, “*Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*”, Yogyakarta

Buku ini termasuk dalam literature yang akan digunakan sebagai bagian dari pembahasan sebuah teori yang termasuk dalam linea diplomasi publik dan diangkat untuk menjalankan proses dari penelitian ini. Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang mengupas kajian tentang paradiplomasi yang ditinjau dari 4 (empat) aspek sekaligus, yakni aspek teoritis ilmu Hubungan Internasional, aspek Yuridis (hukum nasional dan hukum perjanjian internasional), aspek Diplomasi, dan dari aspek Praktis pembuatan kerjasama internasional. Kekuatan buku ini terletak pada upayanya untuk membangun 3 (tiga) pikiran utama, yakni, pertama, membangun konstruksi hubungan dan kerjasama luar negeri secara umum sekaligus meletakkan posisi pemda selaku aktor hubungan transnasional dalam skema itu; kedua, membangun konstruksi hukum dalam kerjasama luar negeri; dan, ketiga, membangun konstruksi tata kelola dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam urusan kerjasama luar negeri. Terlihat jelas pada aktor dari penelitian yang akan diteliti yakni adanya sebuah kerjasama pemerintah daerah NTB dengan pemerintah pusat, adanya dukungan dari aktor internasional (*non government*) dari lembaga lokal yang bersifat independen bekerjasama dengan pemerintah pusat sebagai aktor diplomasi dalam meningkatkan pariwisata NTB sebagai destinasi pariwisata ke tingkat Internasional.



Dari serangkaian tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang memuat secara khusus tentang strategi pemerintah provinsi NTB dalam mempromosikan pariwisata ke kancan Internasional berbeda dari tulisan sebelumnya, namun ada beberapa artikel, jurnal, maupun dari beberapa referensi tulisan atau karya ilmiah mengenai upaya pemerintah NTB dalam melihat serta memanfaatkan sebuah peluang atas potensi pariwisata yang ada. Dengan beberapa tambahan buku panduan pemerintah daerah NTB seperti Pedoman Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, Panduan Publik dari Badan Statistik Pemerintah NTB, dan beberapa buku tahunan tentang data festival, ivent tahunan daerah NTB yang bekerjasama dengan Pesona Indonesia pada tingkat nasional yang berbentuk elektronik maupun tercetak. Hal tersebut dapat digunakan oleh penulis sebagai tambahan referensi yang pernah diteliti sebelumnya untuk menguatkan literature panduan penelitian tesis ini.

## **E. Kerangka Teori**

Teori berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>16</sup> Sehingga teori pasti hasil dari gabungan beberapa konsep yang

---

<sup>16</sup> Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hal.186.

membentuk suatu kesimpulan.<sup>17</sup> Kerangka dasar teori diperlukan dalam menganalisis masalah yang telah dirumuskan sebagai dasar penulisan tesis ini.

Untuk menganalisa permasalahan yang telah rumuskan di latar belakang, penulis akan menggunakan dua teori dan satu konsep, yaitu:

#### 1. Teori Diplomasi Publik

Seiring dengan beragam problematik yang semakin kompleks tentang isu-isu yang berkaitan dalam hubungan internasional membuat aktivitas diplomasi pun semakin berkembang. Sehingga hubungan internasional tidak hanya di aplikasikan terhadap hubungan antar suatu negara, akan tetapi melingkup pada cakupan yang lebih luas yang meliputi hubungan antar masyarakat internasional atau diplomasi tradisional yang termasuk dalam konten diplomasi publik.

Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Diplomasi publik merupakan salah satu dari kunci instrument *soft power*, hal tersebut diakui dalam praktek diplomatik jauh dari sebelum perdebatan kontemporer mengenai diplomasi

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 93-94.

publik selama perang dingin.<sup>18</sup> Dari berbagai macam aktivitas diplomasi, diplomasi publik sendiri berfungsi untuk mempromosikan kepentingan pihak yang melakukan diplomasi melalui pemahaman, informasi serta mempengaruhi publik di luar negeri karena diplomasi publik merupakan bagian dari instrumen *soft power*.<sup>19</sup> Dari implementasinya disebut diplomasi multijalur '*multi-track diplomacy*' bagian dari *soft power diplomacy*.

Pada perkembangan definisi *multi-track diplomacy* menurut DR. Louise Diamond dan Ambassador John McDonald, Amerika Serikat, mendefinisikan;

*"Multi-track Diplomacy is a conceptual way to view the process of international peacemaking as a living system. It looks at the web of interconnected activities, individuals, institutions, and communities that operate together for a common goal: a world at peace".*<sup>20</sup>

Diplomasi Multijalur atau '*Multi-track diplomacy*' merupakan rangkaian upaya yang telah diperluas dari beberapa elemen-elemen yang di desain ulang berbentuk track-track yang memiliki sumber daya, nilai-nilai dari pendekatan yang dilakukan oleh aktor-aktor

---

<sup>18</sup> Hans N. Tuch, 2004. *Communicating With the World: US Public Diplomacy Overseas*. St Martin's Press 1990. New York; and Wilson P. Dizard, *Inventing Public Diplomacy: The Story of the US Information Agency*. Lynne Rienner, Boulder CO and London.

<sup>19</sup> John W. McDonald, "*The Institute for Multi-Track Diplomacy*", *JOURNAL OF CONFLICTOLOGY*, Volume 3, Issue 2 (2012) ISSN 2013-8857 Hlm. 67-68

<sup>20</sup> Diamond, Louise & John McDonald, "*Multi-track diplomacy: a system approach to peace. U.S.: Kumarian*" Press Books For World that Works. Hal 11

dalam dunia hubungan internasional untuk melaksanakan diplomasi, dengan bertumpu pada pemilihan jalur diplomasi yang tepat untuk mempermudah jalannya diplomasi bagi kepentingan masing-masing dari tiap negara di dunia. Para diplomat menyebut sebagai '*total diplomacy*' atau diplomasi total. Hampir semua negara, tak terkecuali Indonesia dalam menetapkan diplomasi total sebagai suatu strategi diplomasi yang resmi digunakan oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Adapun diplomasi dalam tampilan tradisional sebagai permainan dimana peran tanggung jawab aktor dalam hubungan internasional digambarkan tidak lagi menyerupai dimana sebagian besar pelaku saling bersaing baik yang terlibat dalam kegiatan diplomatik maupun yang telah menerima kesepakatan dari hasil politik internasional, sehingga mengakibatkan adanya sebuah perubahan persyaratan bentuk dari diplomasi. Seperti yang dikemukakan oleh *Robert Cooper* bahwa suatu keberhasilan dalam melaksanakan diplomasi perlu adanya sebuah keterbukaan serta kerjasama transnasional.<sup>22</sup> Hal tersebut merupakan *multi-level* dari sebuah panggilan kerjasama dalam hubungan diplomatik yang telah berkolaborasi dengan berbagai aktor-aktor yang berperan. Maka

---

<sup>21</sup> Takdir Ali Mukti, 2013. *Paradiplomacy, 'Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia'*. The Phinisi Press Yogyakarta. Hal.168

<sup>22</sup> Robert Cooper, 2003. *The Breaking of Nations: Order and Chaos in The Twenty-First Century*. Atlantic Books, London, Hal. 76.

diplomasi publik merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk suatu model dari kolaborasi sebuah diplomasi.<sup>23</sup>

Jika dibandingkan, ada tiga perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi yang sifatnya resmi (tradisional). Pertama, diplomasi publik bersifat transparan dan berjangkauan luas, sebaliknya diplomasi tradisional cenderung tertutup dan memiliki jangkauan terbatas. Kedua, diplomasi publik ditransmisikan dari pemerintah ke pemerintah lainnya. Ketiga, tema dan isu yang diusung oleh diplomasi resmi (jalur pertama) ada pada perilaku dan kebijakan pemerintah, sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap dan perilaku publik.

Menurut Hans Tuch mendefinisikan diplomasi publik sebagai 'proses pemerintah berkomunikasi dengan publik asing dalam upaya untuk membawa pemahaman ide-ide, cita-cita, dari lembaga dan budaya sebuah bangsa, serta kebijakan dari sebuah tujuan nasional'.<sup>24</sup> Tuch dalam pemaparannya, mengaku bahwa diplomasi publik tidaklah merupakan sesuatu seperti paradigma diplomatik baru, atau dengan menggantikan hubungan bijaksana dan rahasia antara perwakilan negara. Hal ini memang penting untuk menekankan batas-

---

<sup>23</sup> Shaun Riordan, 2003. *The New Diplomacy*. Polity, London, Hal. 9.

<sup>24</sup> Hans Tuch 1990, *Communicating With the World: US Public Diplomacy Overseas*. St Martin's Press, New York, hal. 3.

batas apa yang baru maupun yang tidak melebihi-lebihkan dari sebuah kepentingan diplomasi publik.

Hans Tuch mengemukakan juga dalam definisi persuasifnya bahwa diplomasi publik ditujukan untuk publik asing, dan strategi untuk berurusan dengan publik tersebut harus dibedakan dari sosialisasi domestik diplomasi. Namun demikian, memisahkan urusan publik (yang ditujukan untuk khalayak domestik) dari diplomasi publik (berurusan dengan kelompok sasaran luar negeri) semakin saling bertentangan dengan realitas hubungan global. Hal ini pada umumnya telah diketahui bahwa informasi diarahkan pada khalayak domestik sering berurusan hingga mencapai publik asing, atau sebaliknya, tetapi hubungan antara urusan publik dan diplomasi publik telah menjadi lebih rumit dari itu. Keterlibatan dengan konstitusi domestik sendiri dengan maksud untuk pengembangan kebijakan luar negeri dan eksternal identitas suatu bangunan telah menjadi bagian dari strategi diplomasi publik dari berbagai negara seperti Kanada, Chile dan Indonesia.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan aktivitas diplomasi tradisional sangatlah melekat pada kewenangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri dan merencanakan strategi-strategi yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*

berkaitan dengan pelaksanaan diplomatik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Berridge 1995 mendefinisikan bahwa<sup>26</sup>:

*'Diplomacy is the conduct of international relations by negotiation rather than by force, propaganda, or recourse of law, and by other peaceful means such as gathering information or engendering goodwill which are either directly or indirectly designed to promote negotiation'.*

Dari pernyataan Berridge tersebut menguatkan aktivitas diplomasi tradisional terhadap adanya sebuah kecenderungan dari peran pemerintah nasional sebagai aktor dalam menentukan sebuah kebijakan, perencanaan serta strategi dari pelaksanaan diplomasi. Sejak kemajuan Perdagangan Internasional (ICT) merevolusi dari sebuah karakter hubungan antar bangsa hingga antar masyarakat internasional pada umumnya, sejak itulah aktivitas diplomasi memunculkan beberapa aktor-aktor baru yang mana diplomasi tidak lagi didominasi oleh peran pemerintah tingkat nasional, namun dapat dilakukan oleh entitas-entitas masyarakat, atau *'sub-state actor'*, yang dalam hal ini merupakan pemerintah regional provinsi dan kota, kelompok masyarakat, bahkan *'people to people diplomacy'*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Berridge, GR, *Diplomacy, Theory and Practice*, Maryland: Prentice Hall/Harvester Wheatscheaf, 1995.

<sup>27</sup> Takdir Ali Mukti, 2013. *Paradiplomacy, 'Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia'*. The Phinisi Press Yogyakarta. Hal.160

Fenomena globalisasi dan perluasan kewenangan atas pemerintah regional atau pemerintah daerah merupakan dua elemen yang menstimulasi munculnya proses dan saluran baru dalam melaksanakan aktivitas diplomasi. Hal ini menunjukkan peran dari pemerintah regional untuk mencoba memanfaatkan peluang secara langsung dalam memajukan kepentingan daerahnya secara lebih spesifik dengan menjalin mitra kerjasama pemerintah daerah ke tingkat internasional.<sup>28</sup>

Keterkaitan diplomasi publik pada arena ilmu hubungan internasional yang meliputi sebuah komponen dasar dari ‘*soft power*’ yang berkenaan langsung terhadap masyarakat sipil maupun beberapa organisasi ‘*non state*’ hingga peran pemerintah daerah dalam mewakili masyarakat umum ikut andil dalam peran sebagai aktor baru diplomasi dan menjadikan diplomasi sebuah manajemen perubahan. Selama berabad-abad institusi diplomasi memang berhasil beradaptasi dengan beberapa perubahan dalam masyarakat internasional berkembang. praktik diplomatik saat ini tidak hanya berkaitan dengan transformasi dalam hubungan antara negara-negara, tetapi progresif juga perlu memperhitungkan dalam mengubah hubungan transnasional. Untuk diplomat masyarakat sipil negara-negara tuan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.161



rumah penting dengan cara yang tak terbayangkan hanya satu generasi yang lalu. Individu biasa adalah semakin terlihat dalam praktek diplomasi, khususnya di bidang diplomasi publik.

## 2. Teori Diplomasi Ekonomi

Dalam ekonomi politik internasional, interaksi antar aktor atau pelaku ekonomi dicapai melalui komunikasi, salah satunya dengan diplomasi. Diplomasi sendiri merupakan suatu aktivitas yang pada awalnya dilakukan oleh pihak tertentu (secara resmi oleh pejabat pemerintah; diplomat) yang mewakili negaranya di negara lain dengan tujuan mencapai kepentingan nasional. Salah satu tugas utama diplomasi adalah mendorong hubungan ekonomi negara yang diwakili terhadap negara tujuan, khususnya dalam hal menjaga hubungan pasar, proteksi, dan pengawasan. Aktivitas inilah yang kemudian disebut sebagai diplomasi ekonomi.<sup>29</sup>

Diplomasi ekonomi merupakan suatu instrumen penting bagi negara dalam mencapai kepentingan nasional, khususnya terkait kepentingan ekonomi. Meski secara tradisional diplomasi ekonomi dipahami sebagai aktivitas yang hanya dilakukan oleh kalangan elit atau politisi, namun pada perkembangannya, aktor non-negara juga memiliki posisi yang penting, dimana hal ini justru sangat signifikan

---

<sup>29</sup> Baranay, 2009. Pavol. *'Modern Economic Diplomacy'*. Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club.

tertelak pada pelaku ekonomi seperti para pengusaha. Adapun fungsi dan peran diplomasi ekonomi di era modern berdampak lebih luas, yang mana hal ini menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan *power* negara (secara ekonomi) serta posisinya dalam sistem internasional. Melalui diplomasi ekonomi, negara dan pelaku ekonomi dapat memperluas jaringan dan hubungannya dengan mitra dagang atau negara lain secara damai, yang kemudian diharapkan dapat menciptakan situasi *win-win*.

Kishan S. Rana (2007, 204-207) dalam tulisannya menjelaskan beberapa faktor penting yang membuat diplomasi ekonomi berjalan sukses, yaitu sebagai berikut; (1) Hubungan ekonomi luar negeri melibatkan tidak hanya kementerian luar negeri, perdagangan, dan industri negara yang bersangkutan, namun juga melibatkan segala unit bisnis di negara tersebut, seperti asosiasi perdagangan dan industri, sektor finansial, sekolah dan lembaga penelitian bisnis, industri pariwisata, dan aktor domestik yang merupakan stakeholder sekaligus *prime mover*. (2) Struktur kementerian luar negeri dan badan pengaturan ekonomi eksternal harus terintegrasi dan selaras. Kebijakan ini telah banyak diambil oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Islandia, dan negara lain seperti Australia, Brunei, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru

dan beberapa negara di Karibia. Negara-negara Skandinavia diatas telah secara utuh mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi, serta kebijakan perdagangan dan bantuan luar negeri kedalam kementerian luar negeri. (3) Membuat prioritas “kembar” diplomasi ekonomi yaitu antara promosi ekspor dan mobilisasi kedalam investasi asing. Promosi ekspor mencakup bantuan terhadap perusahaan domestik yang mencari pasar di luar negeri; studi pasar, kunjungan delegasi bisnis, partisipasi dalam pertemuan perdagangan internasional, serta pertemuan pembeli-penjual. (4) Kerangka peraturan dagang yang secara sah ditentukan oleh pemerintah merupakan pemikiran bersama dengan pelaku bisnis serta thinktanks dan scholars yang bertujuan untuk membentuk kondisi yang meningkatkan perdagangan dan investasi negara. (5) Harus membedakan antara diplomasi ekonomi yang beroperasi di ibukota negara dan di lapangan melalui jaringan yang ada di kedutaan dan konsuler. (6) Adanya perbedaan efektivitas diplomasi ekonomi di tiap-tiap negara. Misi diplomatik yang dijalankan oleh orang-orang terlatih dan staf profesional memberikan keuntungan power dan pengaruh negara yang diwakilinya, dimana menurut Rana contohnya adalah Singapura.<sup>30</sup>

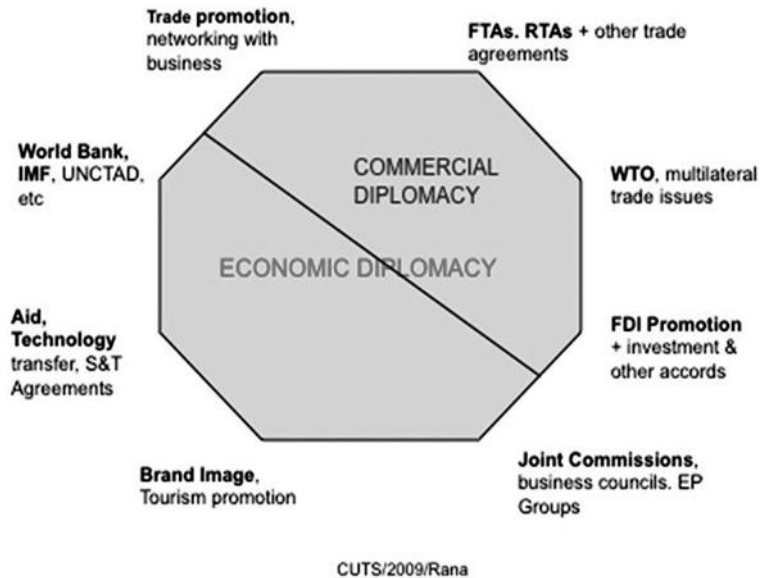
---

<sup>30</sup> Rana, S. Kishan, 2007. “Economic Diplomacy: the Experience of Developing States,”

Diplomasi ekonomi adalah kegiatan multi-warni, mudah untuk menjelaskan dalam sapuan kuas yang luas, tapi lebih sulit untuk dijabarkan dengan presisi. Dari perspektif anggota layanan diplomatik dan komersial atau perdagangan, dan mereka merupakan pelanggan atau pengguna layanan, diplomasi ekonomi adalah seperangkat jamak dari praktek, semua bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi eksternal dalam negeri.

Adanya perbedaan antara diplomasi ekonomi dan diplomasi komersial, beberapa pendapat mengemukakan beberapa dari mereka cenderung melihat diplomasi komersial sebagai bagian dari ringkasan yang lebih luas dari diplomasi ekonomi, seperti biasanya, diplomasi komersial akan tidak termasuk pengelolaan bantuan ekonomi, baik sebagai donor atau sebagai penerima. Akan tetapi itu akan jelas jatuh dalam rubrik diplomasi ekonomi. Hal yang sama mungkin berlaku untuk mengelola hubungan dengan organisasi-organisasi ekonomi internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, atau komisi regional PBB seperti Komisi Ekonomi untuk Asia dan

Pasifik (ESCAP). Sebuah grafik yang menunjukkan karakteristik dan diferensiasi mereka diatur dalam angka pada gambar 4<sup>31</sup>.



**Gambar 4. Ekonomi & Komersial Diplomasi**

Untuk perusahaan bisnis, badan industri, konsultan, pengguna, dan semua orang langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi di luar negeri, perbedaan tersebut tidak menarik. Mereka jauh lebih peduli dengan agen-agen resmi cara dan badan promosi bisnis dapat membantu mereka untuk menavigasi jalan mereka dalam kegiatan yang berorientasi profit mereka di pasar luar negeri. Mereka adalah pelanggan benar diplomasi ekonomi.

<sup>31</sup> Rana S Kishan, 2009. (Former Indian Ambassador, Author, Teacher) & Bipul Chatterjee, (Deputy Executive Director, CUTS International). 'Economic Diplomacy: India's Experience'. *Chapter.1: Introduction: The Role of Embassies*.

Dilihat cara ini, kementerian dan anak mereka, kedutaan besar dan konsulat, sebagai juga kamar dagang, badan industri, badan promosi ekspor dan lembaga penelitian yang berhubungan dengan pekerjaan ini, semua penyedia layanan untuk pelanggan di dunia nyata ini. Tugas mereka adalah untuk memberikan informasi, dan memfasilitasi pelanggan ini dalam interaksi mereka di luar negeri. Ketika instansi pemerintah menetapkan kerangka kebijakan dengan meringkai aturan dan hukum yang mengatur kegiatan tersebut, atau menegosiasikan perjanjian bilateral, regional atau global, mereka masih dalam peran dasar mereka dari penyedia layanan. Para pelanggan adalah pemilik sebenarnya dari diplomasi ekonomi. Mereka juga aktor yang benar-benar menghasilkan perdagangan komoditas dan jasa, melaksanakan kegiatan investasi asing di rumah dan di luar negeri, dan melaksanakan kemitraan teknologi.

Dalam Promosi Investasi Seperti yang dijelaskan oleh Deepak Bhojwani (meliputi diplomasi minyak Indian di Amerika Latin), Memobilisasi FDI untuk negara asal merupakan kaki utama lainnya dari promosi ekonomi. Sehingga kegiatan promosi seperti ekspor dapat mendorong dalam membangun kredibilitas, menemukan sebuah terobosan baru, membudidayakan dalam menghadirkan calon investor dari negara yang ditargetkan, menciptakan sebuah organisasi delegasi

bisnis yang diperlukan, adanya pembagian dalam mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah investasi, dan sejenisnya. Sehingga keamanan energi sangat diperlukan sebagai sarana pertumbuhan dari tindakan yang difokuskan dalam mempromosikan sebuah investasi yang terus melaju.

Sedangkan Jawed Ashraf mengemukakan pada sisi perspektif lingkungan (sketsa kemajuan proyek PLTA on-off dengan Nepal).

*'All countries and regions, rich or poor, strive to attract investments, given that it contributes to economic growth. Besides FDI, 'portfolio investment' and other forms of indirect investments that come in through the stock market or as private-equity contributions are also sought, but they have a lower priority because such investments are more volatile. Funds from abroad, invested in the home-capital market move in and out with rapidity, and are in the nature of fair-weather friends. They have a positive role, but are usually not the focus of promotional efforts'.*

Semua negara dan wilayah, kaya atau miskin, berusaha untuk menarik investasi, mengingat bahwa hal tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain FDI, 'portofolio investasi' dan bentuk lain dari investasi langsung yang masuk melalui pasar saham atau sebagai kontribusi ekuitas swasta juga dicari, akan tetapi memiliki prioritas yang lebih rendah karena investasi tersebut lebih stabil. Dana dari luar negeri, diinvestasikan dalam rumah sebuah ibukota bergerak dalam pasar dan keluar dengan kecepatan, dan

dalam sifat teman-teman yang adil-cuaca. dengan memiliki peran positif, tetapi biasanya tidak fokus dalam mengupayakan sebuah kegiatan promosi.

### 3. Konsep Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial dan ekonomi utama di zaman modern saat ini. Sejak awal 1900 an sebagian besar kegiatan sosial dalam hal pariwisata mempunyai keistimewaan yang hanya terbatas pada kalangan minoritas, sehingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam pariwisata memberikan dampak yang semakin luas.

Pariwisata merupakan sebuah bisnis besar yang menjadikan peluang pada sektor ekonomi global. Pada akhir abad ke-20 sekitar pada tahun 1998 bahwa pariwisata internasional, hampir setiap tahunnya menghasilkan lebih dari US \$ 450 miliar<sup>32</sup>, sementara, menurut *World Travel and Tourism Council* (WWTC) total kegiatan pariwisata global (internasional dan domestik) telah diperkirakan bernilai sekitar US \$ 3,5 triliun. Selain itu, diperkirakan bahwa angka-angka ini akan terus meningkat di masa mendatang. Pariwisata telah lama dikenal sebagai industri pertumbuhan dan harapan saat kenaikan statistik tahunannya sekitar 4% di kedatangan wisatawan

---

<sup>32</sup> WTO (2000) On WWW at [http://www.world-tourism.org/pressrel/00\\_5\\_111.htm](http://www.world-tourism.org/pressrel/00_5_111.htm).



internasional dan belanja, hal tersebut menunjukkan bahwa, pada tahun 2020, pariwisata internasional akan menghasilkan hingga US \$ 2 triliun per tahun.<sup>33</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan bahwa:<sup>34</sup>

*“Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”.*

Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan, dijelaskan sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

---

<sup>33</sup> Richard Sharpley, 2002. Aspect of Tourism, *‘Tourism & Development Concepts & Issues’*. Multilingual Matters.

<sup>34</sup> Undang-Undang RI No.10 Tahun, 2009 Tentang Kepariwisataan. [http: www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id) diakses pada tanggal. 04 oktober 2017

<sup>35</sup> *Ibid*

- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- h. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial

dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

- i. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- j. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
- k. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- m. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

Menurut data statistik WTO pada konsep panduan pariwisata yang berjudul *‘Tourism Satellite Account (TSA)* menjelaskan bahwa.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> United Nations and World Tourism Organization, 1994. *Recommendations on Tourism Statistics*, United Nations Series M, No 83, New York. Di muat pada [http: www. statistics.unwto.org](http://www.statistics.unwto.org) di akses pada tanggal. 04 oktober 2017

- a. *Tourism, described as "the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes"*; Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya.
- b. *Visitor, described as "any person traveling to a place other than that of his/her usual environment for less than 12 consecutive months and whose main purpose of travel is not to work for pay in the place visited"*; Dapat diartikan pengunjung adalah siapa pun yang melakukan perjalanan ke daerah lain di luar dari lingkungan kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut dan tujuan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di daerah tersebut.
- c. *Tourist, described as "overnight visitor, visitor staying at least one night in a collective or private accommodation in the place visited"*; Wisatawan merupakan pengunjung yang menginap atau pengunjung yang tinggal di daerah tujuan setidaknya satu malam di akomodasi umum ataupun pribadi.

d. *Same day visitor, described as “excursionists, visitor who does not spend the night in a collective or private accommodation in the place visited”*; Pengunjung harian adalah ekskurionis, pengunjung yang tidak bermalam di akomodasi umum atau pribadi di daerah tujuan.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat dijabarkan beberapa unsur-unsur penting yang diperhatikan dalam hal pariwisata, antara lain: (a) Jenis aktivitas yang dilakukan dan tujuan kunjungan wisata, (b) lokasi kegiatan wisata (objek wisata), (c) waktu kegiatan di lokasi daerah tujuan wisata, dan (d) pemanfaatan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh usaha dari sebuah kegiatan wisata.

Adanya penegasan WTO dalam deklarasi Manila tentang Pariwisata Dunia bahwa; ‘pariwisata dunia dapat berkontribusi untuk pembentukan tatanan ekonomi internasional baru yang akan membantu untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi melebar antara negara maju dan berkembang dan menjamin percepatan stabil pembangunan ekonomi dan sosial dan kemajuan, khususnya di negara berkembang<sup>37</sup>.

Dalam hal tersebut menanggapi bahwa pariwisata secara luas dianggap sebagai sarana dari pencapaian pembangunan di daerah

---

<sup>37</sup> World Tourism Organisation (WTO) (1980) *Manila Declaration on World Tourism*.  
World Tourism Organisation: Madrid

tujuan, sehingga pembenaran untuk promosi di setiap daerah atau wilayah kurang berkembang dalam dunia industri merupakan sebuah kontribusi dugaan terhadap pembangunan. Dalam konteks ini, pariwisata tidak melihat hanya sebagai katalisator pembangunan tetapi juga merupakan sebagai sebuah perubahan politik dan ekonomi. Artinya, pariwisata internasional dipandang sebagai sarana untuk mencapai sebuah pembangunan kemajuan ekonomi dan sosial serta redistribusi kekayaan dan kekuasaan yang diperlukan untuk mencapai seperti sebuah pembangunan. Pada tahun 1974, *United Nations* telah juga mengusulkan pembentukan sebuah Tatanan Ekonomi Internasional Baru untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam struktur ekonomi dan politik internasional yang ada. sehingga menimbulkan pertanyaan tentang struktur, kepemilikan dan kontrol dari pariwisata internasional.

Dalam memilih pariwisata sebagai tiang pertumbuhan, pemerintah mengidentifikasi sebuah lokasi, yang biasanya berada di daerah marjinal ekonomi yang dianggap sesuai untuk mempertahankan bentuk pengembangan pariwisata. Dengan inisiatif dan insentif pemerintah, investasi publik dan swasta disuntikkan ke area yang dipilih seringkali dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur bersubsidi. Insentif tersebut menarik pengembangan pariwisata

tambahan dan pegawainya. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini menjadi mandiri dan terlepas dari pariwisata populasi penduduk yang masih kritis. Sehingga pariwisata dijadikan isu pembangunan daerah yang mampu menggambarkan sebagai bentuk upaya insentif pemerintah sebagai tolak ukur dari tiang pertumbuhan ke daerah sekitarnya.<sup>38</sup>

Menurut Caalders (2000: 187), menyatakan dalam perencanaan ekonomi regional menekankan bahwa dalam menarik industri asing yang mampu menciptakan tiang pertumbuhan regional dan berfungsi sebagai faktor penarik untuk kegiatan ekonomi lainnya'. Hal ini bertujuan untuk membuka daerah terhadap tren ekonomi global dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang ketergantungan. Jenis kerentanan terhadap perusahaan pariwisata multinasional ini sering diidentifikasi dalam literatur pariwisata sebagai dampak negatif pariwisata serta seruan yang telah dibuat untuk pengembangan yang lebih terkontrol secara lokal.<sup>39</sup>

Menurut Hirschman 1972, dikutip dalam (Blair, 1995) berpendapat bahwa negara-negara terbelakang, dan karenanya daerah tertinggal, memiliki saling ketergantungan yang lemah dan

---

<sup>38</sup> Weaver, D. and Oppermann, M. (2000) *Tourism Management*. Brisbane: John Wiley and Sons

<sup>39</sup> Caalders, J. (2000) *Tourism in Friesland: A network approach*. In G. Richards and D. Hall (eds) *Tourism and Sustainable Community Development*. Routledge: London. (Pp. 185-204)

keterkaitan yang lemah ke belakang dan ke depan. Jika pariwisata adalah menjadi alat pembangunan yang berhasil, itu akan menjadi penting untuk memperkuat hubungan dalam ekonomi lokal.<sup>40</sup>

Dalam membahas hubungan antara pariwisata dan pembangunan daerah, Williams dan Shaw (1995) meneliti tiga aspek pariwisata:<sup>41</sup>

- a. pariwisata merupakan produk yang harus dikonsumsi pada titik produksi
- b. Sebagian besar bentuk pariwisata sangat temporal
- c. pariwisata merupakan industri yang mengalami restrukturisasi

Dalam konteks pariwisata massal, titik-titik pasokan secara spasial tetap dan tunduk menjunjung tinggi polarisasi spasial. Titik-titik ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti iklim dan distribusi geomorfologi obyek wisata, seperti pantai / sinar matahari dan pegunungan / salju. konstruksi sosial juga memiliki peran dalam membedakan apa yang penting bagi wisatawan untuk melihat. Fitur kedua adalah bahwa pariwisata memiliki tingkat musiman, yang dapat menghasilkan dikotomi antara pekerja dengan karyawan di pinggiran yang memegang kontrak sementara. Elemen terakhir dari analisis mereka adalah kenyataan bahwa pariwisata telah mengalami proses

---

<sup>40</sup> Blair, J. (1995) *Local Economic Development: Analysis and Practice*. London: Sage.

<sup>41</sup> Williams, A. and Shaw, G. (1995) *Tourism and regional development: Polarization and new forms of production in the United Kingdom*. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 86 (1), 50–63.



restrukturisasi yang telah melihat perkembangan berbagai bentuk wisata yang berbeda seperti pameran warisan budaya dan industri, yang memiliki atribut spasial yang berbeda. Beberapa jenis 'yang baru' ini bermanfaat bagi keuntungan sementara yang lain menguntungkan pinggiran kota.

## **F. Hipotesa**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atas peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB di tahun 2011 s/d 2016 adalah:

1. Kerjasama pemerintah provinsi NTB dan pemerintah pusat melalui: Pengembangan pariwisata antara kunjungan (*visit*), undangan (*invite*) dan penyelenggaraan kegiatan (*event*) serta pemanfaatan *information and communication technology* (ICT) dalam menjadikan daerah tujuan wisata (DTW) yang berdaya saing internasional.
2. Kebijakan pemerintah provinsi NTB dalam pengembangan sektor industri ekonomi melalui:
  - a. Peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata (DTW),
  - b. Peningkatan partisipasi usaha lokal serta peningkatan daya saing produktivitas dan jasa yang menjadi fokus pemasaran, dan
  - c. Target pertumbuhan realisasi investasi dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sebagai pedapatan hasil devisa daerah NTB.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk menghindari adanya pelebaran penelitian mengenai strategi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maka dibutuhkan batasan penelitian.

Adapun batasan penelitian ini adalah sejak tren kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin meningkat dengan menampilkan beberapa statistik perkembangan pariwisata di NTB pada tahun 2011. Adanya beberapa pasar unggulan yang menjadi kawasan potensial dalam pengembangan pariwisata di tahun 2013. Beberapa aspek yang menjadikan NTB sebagai daerah tujuan wisata (DTW) dengan adanya sebuah sarana seperti beroperasinya bandara internasional Lombok (BIL) hingga upaya pemerintah NTB dalam penerapan sebuah prioritas strategis jangka menengah dan jangka panjang di tahun 2016. Sehingga penulis membatasi penelitian sejak periode perkembangan pariwisata NTB di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>42</sup>

## 2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari pelebaran penjelasan pada penelitian tentang Strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mempromosikan Pariwisata Ke Kancan Internasional. Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan sebuah penelitian. Adapun jangkauan dalam penelitian ini dimulai sejak tahun 2011 saat dimana perkembangan wisatawan mancanegara semakin meningkat dilima tahun terakhir hingga tahun 2016. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai perwakilan aktor pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sub bagian promosi (pemasaran) dan kepala dinas terkait pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis akan gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya,

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku atau aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data (Sumber Data)

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer, yakni:

- a. data sekunder terdiri dari telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- b. Sedangkan data primer terdiri dari, beberapa dokumen, arsip, undang-undang, observasi (penelitian lapangan), dan wawancara.

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi dan dipaparkan terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu:

BAB I. Membahas tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Memaparkan rangkaian dinamika pengembangan potensi destinasi pariwisata yang menjadikan sebagai bagian dari peluang dalam mengembangkan pariwisata yang ada di provinsi NTB.

BAB III. Mengemukakan perkembangan kinerja pariwisata NTB dalam beberapa tahun terakhir sebagai kaca perbandingan dalam melihat pertumbuhan angka kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.

BAB IV. Menganalisis bentuk dari strategi pemerintah daerah provinsi NTB terhadap pengembangan pariwisata atas kunjungan wisatawan yang semakin meningkat dalam mempromosikan pariwisata ke Kancan Internasional.

BAB V. Kesimpulan. Bab ini berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.